



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
MENGUNAKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi**

**Oleh :**

**RAYHAND FAHREZA HARIANTIKA**

**2015100043**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**2024**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

JUDUL : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN  
KONSEP VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH SUMATERA UTARA.

NAMA : RAYHAND FAHREZA HARIANTIKA  
N.P.M : 2015100043  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : *Akuntansi*  
TANGGAL KELULUSAN : 08 Mei 2024

**DIKETAHUI**

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

**DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dito Aditia Darna Nst, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Puja Rizqy Ramadhan, S.E., M.Si.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAYHAND FAHREZA HARIANTIKA**  
NPM : 2015100043  
Prodi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis kinerja keuangan daerah dengan menggunakan konsep value for money pada pemerintah sumatera utara.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya tulis orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Ekklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan pengelola mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Skripsi ini melalui internet dan media lain bagi kepentingan akademik.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui apabila pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2024



**RAYHAND FAHREZA HARIANTIKA**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAYHAND FAHREZA  
Tempat / Tanggal Lahir : HARIANTIKA  
NPM : Medan / 02-01-2003  
Fakultas : 2015100043  
Program Studi : Sosial Sains  
Alamat : Akuntansi  
: KOMP BARAKUDA BLK AI-NO 3 LK XVI

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 13 Mei 2024

Yang memb



RAYHAND FAHREZA  
HARIANTIKA

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan konsep *Value For Money*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan selama periode lima tahun, dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Objek penelitian adalah data Laporan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdapat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) selama periode tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan observasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022, berdasarkan konsep *Value For Money*, dinilai baik dari tiga aspek utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dari segi ekonomi, terlihat bahwa rasio ekonomi selama periode tersebut mencapai kategori 'ekonomis'. Dari segi efisiensi, rasio efisiensi selama periode yang sama mencapai kategori 'efisien'. Sementara itu, dari segi efektivitas, rasio efektivitas selama periode tersebut juga mencapai kategori 'efektif'. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep *Value For Money* sangat baik untuk diterapkan pada Provinsi Sumatera Utara karena memberikan gambaran yang terstruktur dan komprehensif mengenai kinerja keuangannya. Hal ini membantu dalam memahami sejauh mana keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** kinerja, *value for money*, ekonomis, efisiensi, efektivitas.

## Abstract

This research aims to start regional financial operations in North Sumatra Province using the *Value For Money* concept. This research is descriptive research conducted over a five year period, from 2018 to 2022. The object of the research is data from the Regional Budget and Expenditure Report (APBD) and the Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report (RAPBD) of the North Sumatra Provincial Government contained in the Report Performance of Government Agencies (LKJIP) during that period. The data collection methods used are documentation and observation, while the data analysis technique used is quantitative descriptive analysis. The research results show that the regional financial performance of North Sumatra Province for the 2018-2022 period, based on the *Value For Money* concept, is assessed as good from three main aspects, namely economy, efficiency and effectiveness. From an economic perspective, it can be seen that the economic ratio during this period reached the 'economic' category. In terms of efficiency, the efficiency ratio during the same period reached the 'efficient' category. Meanwhile, in terms of effectiveness, the effectiveness ratio during this period also reached the 'effective' category. Based on the results of this research, it can be concluded that the *Value For Money* concept is very good to apply in North Sumatra Province because it provides a comprehensive and comprehensive picture of its financial performance. This helps in understanding the extent of success of the North Sumatra Provincial Government in achieving the financial goals that have been set.

**Keywords:** performance, *value for money*, economics, efficiency, effectiveness.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**”

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si., selaku dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
3. Ibu Dr.Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si selaku Ka. Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang sudah banyak membantu meberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Bapak Puja Rizqy Ramadhan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang juga sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi saya.
6. Ibu Dra Mariyam, MSi., Ak. Selaku Dosen Penguji saya yang sudah sangat luar biasa membantu melancarkan skripsi saya.
7. Ibu Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si Dosen Penguji saya sudah sangat luar biasa membantu melancarkan skripsi saya.

8. Teristimewa kepada Orang Tua penulis Ayahanda Ucok Harianto dan Ibunda Sartika yang selalumendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanan.
9. Ibu Novita Beserta jajarannya yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian di BPKAD Sumatera Utara.
10. Seluruh Dosen pengajar serta pegawai Fakultas Sosial Sains, Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
11. Kepada seluruh teman-teman yang membantu saya secara langsung dan tidak langsung.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang membacanya, dan penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Medan, 12 Mei 2024

Rayhand Fahreza Hariantika

2015100043



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1 <i>Theory Agency</i> .....	10
2.1.1.1 Pengertian <i>Theory Agency</i> .....	10
2.1.2 Kinerja Keuangan .....	11
2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan .....	11
2.1.2.2 Pengukuran Kinerja .....	12
2.1.2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja.....	13

2.1.3	<b>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....</b>	<b>15</b>
2.1.3.1	Pengertian <b>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....</b>	15
2.1.3.2	Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	16
2.1.3.3	Dasar Hukum Laporan Keuanagn Pemerintah Daerah.....	18
2.1.3.4	Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	19
2.1.3.5	Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah .....	21
2.1.4	<i>Value For Money</i> .....	22
2.1.4.1	Pengertian <i>Value For Money</i> .....	22
2.1.4.2	Indikator <i>Value for Money</i> .....	23
2.1.4.3	Langkah-langkah pengukuran <i>Value for Money</i> .....	24
2.2	Penelitian Terdahulu.....	27
2.3	Kerangka Berpikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>36</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	36
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.3	Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....	38
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	39
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.6	Teknik Analisa Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>43</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	43
4.1.1	Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara .....	..43
4.1.2	Deskripsi Data Penelitian .....	..44

4.2 Pembahasan .....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	
<b>BIODATA DIRI.....</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara .....	3
Tabel 1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Utara .....	4
Tabel 2.1 Pengukuran Rasio Ekonomis .....	25
Tabel 2.2 Pengukuran Rasio Efisien .....	26
Tabel 2.3 Pengukuran Rasio Efektivitas .....	27
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	37
Tabel 3.2 Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis .....	40
Tabel 3.3 Klasifikasi Pengukuran Rasio Efisien .....	41
Tabel 3.4 Klasifikasi Pengukuran Rasio Efektivitas .....	41
Tabel 4.1 Rasio Ekonomis .....	45
Tabel 4.2 Rasio Efisien .....	48
Tabel 4.3 Rasio Efektivitas .....	51

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	..35
Gambar 4.1 Rasio Ekonomis .....	..53
Gambar 4.2 Rasio Efisien .....	..55
Gambar 4.3 Rasio Efektivitas .....	..57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung proses pembangunan di tingkat lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Abdul Halim (2018:67), PAD merujuk pada "seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi lokal." Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah sangat penting bagi setiap wilayah.

Dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, daerah yang memiliki pendapatan yang cukup besar akan lebih mampu untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor yang vital, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Sutedi (2014:8), tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap memiliki peran penting, baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan publik. Pendapatan daerah masih menjadi alternatif utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan serta pelayanan publik ketika berkaitan dengan pembiayaan.

Untuk memaksimalkan kemandirian daerah dan meningkatkan tingkat pembangunan serta mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus giat meningkatkan PAD. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa sumber-sumber PAD harus dioptimalkan secara maksimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup berbagai komponen, termasuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pajak Daerah, sebagai salah satu bagian dari PAD, memiliki potensi besar untuk pengembangan yang efektif. Oleh karena itu, manajemen pajak daerah harus dilakukan secara profesional dan transparan guna mengoptimalkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah (Halim,2018).

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah No. 77 Tahun 2020, Retribusi daerah menunjuk pada pungutan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Dengan melakukan pungutan retribusi secara teratur dan teratur, dapat mendukung pembangun daerah secara berkelanjutan. Ketika pembangunan daerah berjalan lancar, maka akan membawakan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki posisi, fungsi, dan peran yang signifikan dan strategis di tingkat origional, Provinsi Sumatera utara memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap kondisinya sebagai dasar dalam perencanaan, terutama dalam merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan. Dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara, terdapat data mengenai pajak dan retribusi daerah yang terdokumentasikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1**

**Pendapatan Daerah**

**Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	%
2018	13.037.539.478.554	12.703.058.587.890	97,43%
2019	14.043.339.344.970	13.081.482.296.509	93,21%
2020	13.077.362.353.824	12.916.359.750.490	98,77%
2021	13.687.035.662.525	14.034.036.626.478	102,54%
2022	12.459.352.172.672	12.594.412.688.861	101,08%

*Sumber : Data diolah (2023)*

Dilihat dari tabel 1.1 realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2021 dan tahun 2022 memperoleh realisasi pendapatan yang melebihi dari jumlah anggaran pendapatan daerah, walaupun begitu, jumlah realisasi pendapatan daerah ditahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2021. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah kurang maksimal

Menurut Mahmudi (2016:155), analisis kinerja pendapatan daerah dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggarannya. Jika realisasi pendapatan melebihi anggaran (target), maka kinerja dapat dianggap baik.

Artinya, jika pendapatan yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah daerah melebihi perkiraan yang telah ditetapkan dalam anggaran, hal tersebut



menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah berhasil melebihi harapan atau target yang telah ditetapkan. Ini merupakan indikasi positif tentang keberhasilan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Namun, penting untuk dicatat bahwa evaluasi kinerja pendapatan daerah tidak hanya bergantung pada perbandingan antara realisasi dan anggaran saja. Aspek-aspek seperti efisiensi pengelolaan pendapatan dan penggunaannya untuk pembangunan yang berkelanjutan juga perlu diperhatikan dalam menilai kinerja keseluruhan pemerintah daerah dalam hal pendapatan.

Sedangkan untuk anggaran dan realisasi belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja**  
**Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	%
2018	12.290.330.450.127	10.993.656.938.251	89,45%
2019	14.726.662.153.406	13.527.855.950.251	91,86%
2020	11.494.671.486.409	10.935.643.264.218	95,14%
2021	13.953.318.293.830	13.225.393.166.670	94,78%
2022	13.395.006.196.440	12.509.062.821.349	93,39%

*Sumber : Data diolah (2023)*

Berdasarkan tabel I-2 di atas bahwa anggaran belanja daerah untuk tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan, demikian juga untuk realisasi belanja daerah untuk tahun 2019 dan tahun 2021 mengalami peningkatan. Meskipun realisasi belanja daerah mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Sumatera Utara. Hal ini mencerminkan kinerja yang cukup baik dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, di mana mereka berhasil menjaga belanja daerah agar tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2016:155), analisis terhadap kinerja belanja daerah dianggap baik jika realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

Penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah juga dapat dilakukan melalui laporan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Dengan melakukan pengukuran ini, pemerintah dapat mengevaluasi kinerjanya dalam memungut pendapatan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut Mahmudi (2016:89), konsep *Value for Money* yang biasanya digunakan oleh perusahaan publik juga dapat diterapkan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Kinerja tidak hanya dinilai dari output yang dihasilkan, tetapi juga harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Salah satu metode pengukuran kinerja adalah melalui sistem value for money, yang terdiri dari tiga pokok bahasan indikator: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Efektivitas, menurut Mardiasmo (2014), mengukur tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi efektivitas, semakin efektif kinerja pemerintah daerah. Sedangkan efisiensi, menurut definisi dari Halim

(2018:164), adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil efisiensi menunjukkan kinerja pemerintah yang lebih baik.

Fungsi ekonomi, seperti yang dijelaskan oleh Mahsun (2018:179), mengukur tingkat kehematan pengeluaran organisasi sektor publik dengan membandingkan biaya dengan realisasi pendapatan, yang menunjukkan efisiensi. Perbandingan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target yang telah ditetapkan menunjukkan efektivitas kinerja pemerintah daerah (Halim, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan realisasi pendapatan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara ditahun 2020 dan tahun 2022.
2. Realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2018 sampai tahun 2020 masih berada dibawah dari anggaran pendapatan yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Utara

## **1.3 Batasan Masalah**

Dengan mempertimbangkan fokus penelitian yang diinginkan, maka identifikasi masalah yang tepat untuk penelitian ini adalah:

“Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan konsep *Value For Money* dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, dengan menggunakan laporan keuangan berupa realisasi pendapatan dan belanja daerah sebagai indikator. Fokus penelitian terletak pada evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dengan memanfaatkan pendekatan *Value For Money*.”

Dengan identifikasi masalah yang jelas ini, penelitain akan lebih berfokus pada aspek yang dimaksud dan tidak akan meluas dari pembahasan yang ditetapkan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Permasalahan penelitain yang diusulkan adalah sebagai berikut:

“Bagaimana peranan konsep *Valuer For Money* dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara?”

Dengan permasalahan ini, peneliti akan berfokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis peranan konsep *Valuer for Money* dalam evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam hal efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana publik yang tercerminkan dari realisasi pendapatam dan belanja daerah.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengalisis pernan konsep *Value For Money* dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.”

Dengan tujuan ini, penelitian akan fokus untuk memahami peranan konsep *Value For Money* dalam evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian akan mencoba untuk mengidentifikasi sejauh mana konsep *Value For Money* dapat digunakan sebagai alat untuk mengavaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana publik di tingkat provinsi.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan melatih penerapan teori yang telah dipelajari selama kuliah. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengasah keterampilan analisis, pengumpulan data, dan pembuatan laporan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang bagi penulis untuk mengeksplorasi topik yang menarik dan relevan di bidang keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan memahami peranan *value for money* dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dan perbandingan yang berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin menggali lebih dalam tentang peranan *value for money* dalam konteks keuangan pemerintah daerah. Temuan dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini

dapat menjadi landasan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut dalam bidang ini, serta memperkaya literatur yang tersedia tentang manajemen keuangan sektor publik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Theory Agency***

###### **2.1.1.1 Pengertian *Theory Agency***

Berdasarkan teori agensi yang dijadikan sebagai landasan utama dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Teori agensi digunakan karena dapat menjelaskan dinamika hubungan antara pemerintah yang bertindak sebagai agen yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk mengelola dana publik dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam konteks teori agensi, juga dipelajari masalah-masalah yang timbul akibat dari hubungan keagenan ini, termasuk biaya-biaya yang timbul yang dikenal sebagai *agency cost*.

Menurut Zimmerman (2013:22), dalam konteks pemerintahan, terdapat masalah agensi yang melibatkan hubungan antara pejabat pemerintah yang terpilih dan diangkat sebagai agen dengan para pemilih (masyarakat) sebagai prinsipal. Dalam kedua konteks tersebut, masalah agensi dan asimetri informasi dapat berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak selalu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara optimal.

Dengan dasar teori agensi ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis peranan konsep *Value for Money* dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada upaya mengatasi masalah agensi

dan mengurangi agency cost melalui efektifitas monitoring dan pengelolaan informasi.

## **2.1.2 Kinerja Keuangan**

### **2.1.2.1 Pengertian kinerja keuangan**

Berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber, kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai analisis yang mengukur sejauh mana suatu organisasi atau perusahaan telah menjalankan aturan-aturan keuangan dengan baik dan sesuai prosedur. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan keuangan telah dilakukan dengan baik dan benar.

Dalam konteks sektor publik, termasuk pemerintahan, kinerja keuangan menjadi isu penting terutama sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja. Semua pemerintah dituntut untuk menghasilkan kinerja keuangan yang baik guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan dalam pengelolaan dana publik.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merujuk pada kemampuan suatu daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimilikinya, termasuk pendapatan asli daerah, untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan, serta memberikan fleksibilitas dalam menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kinerja keuangan pemerintah daerah mencakup aspek efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam



pengelolaan keuangan serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan mencerminkan hasil kerja atau perbandingan kualitas dan kuantitas baik secara fisik maupun non-fisik, yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana. Indikator kinerja keuangan seringkali meliputi kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran, tujuan, visi, dan misi perusahaan atau organisasi dalam meningkatkan kinerjanya.

#### **2.1.2.2 Pengukuran Kinerja**

Menurut Mahmudi (2016:60), pengukuran kinerja merupakan bagian integral dari fungsi pengendalian manajemen karena dapat digunakan untuk mengontrol aktivitas organisasi. Setiap aktivitas harus memiliki ukuran kinerja yang terdefinisi dengan jelas agar efisiensi dan efektivitasnya dapat dievaluasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, pengukuran kinerja seringkali dilakukan untuk menilai tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*). Tanpa adanya ukuran kinerja yang jelas, sulit bagi organisasi untuk menentukan apakah suatu aktivitas telah sukses atau gagal dalam mencapai tujuannya.

Dengan demikian, pengukuran kinerja menjadi penting dalam manajemen organisasi untuk mengontrol dan mengevaluasi aktivitas, serta untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan tujuan organisasi tercapai dengan baik.

Dengan kata lain, pengukuran kinerja membantu organisasi untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian tujuan dan visi yang diinginkan telah

tercapai. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, serta memanfaatkan kekuatan yang ada untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam operasi perusahaan.

Secara keseluruhan, pemahaman mengenai pengukuran kinerja memberikan pandangan holistik tentang kinerja suatu organisasi, yang mencakup aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih baik.

### **2.1.2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja**

Menurut Menurut Sujarweni (2015: 107-108), pengukuran kinerja sektor publik memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. **Memperbaiki Kinerja Masa Depan:** Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi sektor publik agar lebih baik dalam mencapai tujuan di masa yang akan datang.
2. **Pengambilan Keputusan:** Informasi hasil pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, seperti mengganti kebijakan atau mempertahankan pimpinan.
3. **Mewujudkan Tanggung Jawab Publik:** Pengukuran kinerja membantu mewujudkan tanggung jawab publik dengan memastikan bahwa organisasi sektor publik bertanggung jawab atas kinerjanya.
4. **Komunikasi Strategi:** Pengukuran kinerja membantu meningkatkan komunikasi strategi antara atasan dan bawahan di dalam organisasi.
5. **Pengalokasian Sumber Daya:** Informasi tentang kinerja membantu dalam pengalokasian sumber daya organisasi.

6. Pengukuran Kinerja Finansial dan Non-Finansial: Pengukuran kinerja sektor publik harus mencakup kedua aspek ini agar dapat melacak perkembangan pencapaian strategis organisasi.
7. Pendorong Akuntabilitas Publik: Pengukuran kinerja adalah salah satu faktor yang mendorong terciptanya akuntabilitas publik.

Menurut Sujarweni (2015: 109-114), informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja meliputi:

1. Informasi Finansial: Penilaian kinerja finansial didasarkan pada analisis varians antara kinerja aktual dengan anggaran yang telah dibuat. Ini meliputi varians pendapatan dan varians pengeluaran, serta identifikasi sumber penyebab terjadinya varians hingga ke level manajemen paling bawah. Analisis varians secara garis besar berfokus pada:

- a. Varians pendapatan (*revenue varians*)
- b. Varians pengeluaran (*expenditure variance*)
- c. Varians belanja rutin
- d. Varians belanja investasi/modal (*recurrent expenditure variance*)

2. Informasi non finansial

Informasi nonfinansial memainkan peran penting dalam menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak digunakan oleh berbagai organisasi saat ini adalah Balanced Scorecard. Metode Balanced Scorecard dirancang untuk mengukur kinerja organisasi dengan mempertimbangkan aspek finansial dan nonfinansial.

Balanced Scorecard dianggap sesuai untuk organisasi sektor publik karena pendekatannya yang tidak hanya terfokus pada aspek kuantitatif dan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek kualitatif dan nonfinansial. Dengan menggunakan Balanced Scorecard, organisasi dapat mengukur kinerjanya dari berbagai perspektif, seperti keuangan, pelanggan, proses internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, Balanced Scorecard memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja organisasi, memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area-area yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, penggunaan Balanced Scorecard membantu organisasi sektor publik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Kesimpulan yang dapat diambil dari pandangan beberapa ahli, termasuk Ramli (2016), adalah bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan ini memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan suatu entitas, dalam hal ini pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah karena mereka telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan adanya laporan keuangan yang sesuai dengan standar, pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya dapat memahami dengan jelas kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut. Laporan keuangan yang akurat, jelas, dan mudah dipahami akan membantu dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya keuangan, evaluasi kinerja, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

### **2.1.3.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Menurut Ramli (2016: 7-9), laporan keuangan merupakan sebuah dokumen terstruktur yang memuat informasi mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pokok terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

#### **1. Laporan Realisasi Anggaran:**

Laporan ini menyajikan ringkasan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, serta membandingkan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang tercakup dalam laporan ini meliputi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

#### **2. Neraca:**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu, dengan mencantumkan asset, kewajiban, dan ekuitas. Beberapa pos yang terdapat dalam neraca antara lain kas, investasi, piutang, persediaan, asset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

### 3. Laporan Arus Kas:

Laporan tersebut menggambarkan aliran kas yang terkait dengan berbagai aktivitas, seperti operasional, investasi dalam aset non-keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran selama periode tertentu. Informasi yang disajikan meliputi penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan tersebut. Dengan demikian, laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana kas masuk dan keluar dari entitas selama periode waktu yang ditentukan, yang mencakup berbagai kegiatan operasional dan investasi serta kebutuhan pembiayaan.

### 4. Catatan Atas Laporan Keuangan:

Bagian ini berfungsi sebagai penjabaran rinci terkait angka-angka yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu, catatan ini juga mencakup penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan, informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, serta informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek tersebut kepada para pembaca laporan keuangan, sehingga mereka dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif dan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi keuangan entitas terkait.

### 5. Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas:

Laporan kinerja keuangan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja keuangan suatu entitas, dalam hal ini pemerintah daerah. Selain laporan keuangan pokok, pemerintah daerah juga dapat menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas guna memberikan informasi

yang lebih lengkap dan mendalam tentang kondisi keuangan dan kinerja entitas tersebut.

### **2.1.3.3 Dasar Hukum Laporan Keuanagn Pemerintah Daerah**

Menurut Ramli (2016: 9-10), pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan undang-undang yang mengatur keuangan pemerintah. Beberapa peraturan tersebut antara lain:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945): Bagian dari UUD 1945 yang mengatur mengenai keuangan negara menjadi dasar bagi pelaksanaan keuangan pemerintah.

1. Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara: Undang-undang ini mengatur secara umum mengenai kebijakan keuangan negara, termasuk tata cara pengelolaan keuangan yang harus diikuti oleh pemerintah
2. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): Undang-undang ini mengatur tentang penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN, yang menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan negara.
3. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang Pemerintah Daerah: Terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangannya.
4. Ketentuan Perundang-Undangan tentang Pelaksanaan APBN/APBD: Terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan APBN dan APBD yang harus dipatuhi oleh pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi keuangannya dengan baik.

5. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang Mengatur tentang Keuangan Pusat dan Daerah: Selain ketujuh peraturan di atas, terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang secara langsung atau tidak langsung mengatur mengenai keuangan pusat dan daerah.

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah dapat melaksanakan pelaporan keuangan secara teratur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tercipta transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara.

#### **2.1.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berikut adalah beberapa karakteristik kualitatif yang penting dalam laporan keuangan menurut Ramli (2016: 10-12):

1. Relevansi: Informasi dalam laporan keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk membuat keputusan ekonomi. Informasi yang relevan dapat mempengaruhi keputusan pengguna atau membantu mereka dalam mengevaluasi kejadian masa lalu, memprediksi masa depan, atau menilai masa kini.
2. Keandalan: Informasi dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, artinya informasi tersebut harus akurat, lengkap, dan bebas dari bias. Pengguna harus dapat mempercayai informasi tersebut dalam membuat keputusan ekonomi.
3. Ketepatan waktu: Informasi dalam laporan keuangan harus tersedia tepat waktu sehingga pengguna dapat menggunakannya untuk keperluan yang relevan. Keterlambatan dalam penyediaan informasi dapat mengurangi nilai informasi tersebut.



4. Kesahihan: Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan dengan jujur dan tidak mengandung manipulasi atau penyesatan. Kesahihan informasi mencakup kejujuran, integritas, dan kewajaran.
5. Komparabilitas: Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan baik secara internal (dengan informasi dari periode sebelumnya) maupun eksternal (dengan informasi dari entitas lain). Komparabilitas memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi perubahan dari waktu ke waktu atau membandingkan kinerja dengan entitas sejenis.
6. Konsistensi: Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara konsisten dari waktu ke waktu dan antara periode pelaporan. Konsistensi memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi tren atau pola yang relevan dalam kinerja entitas.
7. Materialitas: Informasi dalam laporan keuangan harus material, artinya informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Informasi yang tidak material dapat diabaikan dalam proses pengambilan keputusan.
8. Kelengkapan: Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap, yaitu mencakup semua informasi yang relevan dan diperlukan untuk memahami posisi keuangan, kinerja, dan perubahan keuangan entitas.

Karakteristik-karakteristik ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh pengguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi disajikan.

### **2.1.3.5 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah**

Menurut Ramli (2016: 15), tujuan laporan keuangan pemerintah meliputi:

1. Menyajikan Informasi tentang Posisi Keuangan: Laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan entitas pemerintah pada suatu periode tertentu. Hal ini mencakup informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas bersih yang membantu para pengguna laporan untuk memahami kondisi keuangan pemerintah.
2. Menyajikan Informasi tentang Realisasi Anggaran: Laporan keuangan pemerintah juga bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran. Hal ini mencakup pencapaian atau ketidapencapaian terhadap target anggaran yang telah ditetapkan, sehingga memberikan gambaran tentang sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan telah digunakan dan hasilnya.
3. Menyajikan Informasi tentang Arus Kas: Tujuan lain dari laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai arus kas. Ini mencakup informasi tentang sumber-sumber penerimaan kas dan penggunaan kas oleh pemerintah selama periode tertentu, yang penting untuk memahami likuiditas dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban keuangan.
4. Menyajikan Informasi tentang Kinerja Keuangan: Laporan keuangan pemerintah juga bertujuan untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan entitas pemerintah. Ini mencakup evaluasi atas efisiensi

pengelolaan sumber daya keuangan, kemampuan dalam memperoleh pendapatan, serta keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan keuangan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang relevan, andal, dan terkini kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, masyarakat, investor, dan pihak lain yang berkepentingan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam mengelola sumber daya keuangan dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah.

#### **2.1.4 Value For Money**

##### **2.1.4.1 Pengertian Value For Money**

Berdasarkan definisi dari Mardiasmo (2014:4) dan Indra Bastian (2016:335), dapat disimpulkan bahwa konsep *Value for Money* adalah pendekatan dalam pengukuran kinerja sektor publik yang menekankan tiga elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berikut adalah pengertian dari masing-masing elemen tersebut:

1. Ekonomi: Merujuk pada penggunaan sumber daya yang tersedia secara bijaksana dan efisien. Ini berarti bahwa organisasi sektor publik harus mampu memanfaatkan sumber daya dengan biaya yang seminim mungkin tanpa mengorbankan kualitas atau tujuan akhir yang ingin dicapai.
2. Efisiensi: Mengacu pada kemampuan organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Efisiensi terkait dengan upaya untuk menghindari pemborosan

dan memaksimalkan output atau hasil yang dihasilkan dari setiap unit sumber daya yang digunakan.

3. Efektivitas: Mengukur sejauh mana organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas menekankan pada pencapaian hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif, baik dalam menghadapi tantangan atau memanfaatkan peluang yang ada.

Dengan memperhatikan ketiga elemen ini secara bersama-sama, konsep *Value for Money* membantu organisasi sektor publik dalam mengevaluasi kinerjanya secara komprehensif, memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik diarahkan untuk mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang sesuai dan efektivitas yang maksimal.

#### **2.1.4.2 Indikator *Value for Money***

Tuntutan masyarakat terhadap konsep *Value for Money* meliputi tiga aspek utama: ekonomis (hemat), efisien (penggunaan sumber daya yang efektif), dan efektif (pencapaian tujuan dan sasaran). Konsep ini memberikan arahan bahwa pengadaan dan alokasi sumber daya harus hemat, penggunaan sumber daya harus efisien, dan hasil yang dicapai harus efektif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Indikator kinerja pada konsep *Value for Money* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi), yang mencakup pembelian barang dan jasa dengan harga terbaik (ekonomis) serta pencapaian output tertentu dengan sumber daya serendah-rendahnya (efisiensi).

2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas), yang menilai kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Dengan menerapkan konsep *Value for Money* dalam pengukuran kinerja, organisasi sektor publik dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan penggunaan sumber daya yang hemat dan efisien. Ini memungkinkan terciptanya mutu pelayanan yang baik dan pencapaian tujuan yang efektif dalam lingkungan yang terbatas oleh anggaran yang tersedia.

#### **2.1.4.3 Langkah-langkah pengukuran *Value for Money***

1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi dalam konteks pengelolaan anggaran publik mempertimbangkan masukan atau input yang digunakan dalam hubungannya dengan output yang dihasilkan. Ini merupakan ukuran relatif yang membandingkan input yang direncanakan (target anggaran) dengan input yang sebenarnya (realisasi anggaran). Dalam hal ini, ekonomi dapat diartikan sebagai perbandingan antara input dan input value.

Rumus ekonomis untuk retribusi daerah dapat dirumuskan sebagai berikut, sebagaimana yang disarankan oleh Mahsun (2018:179):

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rumus ini digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi anggaran telah mencapai target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi nilai hasil perhitungan, semakin ekonomis pengelolaan retribusi daerah tersebut.

**Tabel 2.1**

**Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90-100%	Ekonomis
80-90%	Cukup Ekonomis
60-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

*Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327*

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur antara output dengan input. Semakin besar efisiensi tersebut maka semakin efisien suatu organisasi (Indra Bastian 2016: 280). Mardiasmo (2014: 133) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari hasil perhitungan menggunakan formula efisiensi adalah klasifikasi pengukuran efisiensi.

**Tabel 2.2**

**Klasifikasi Pengukuran Rasio Efisiensi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
( $\leq$ 60%)	Sangat efisien
(60% - 80%)	Efisien
(80% - 90%)	Cukup efisien
(90% - 100%)	Kurang efisien
(> 100%)	Tidak efisien

*Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327*

Pengukuran efisiensi dan efektivitas dalam konteks manajemen sektor publik merupakan hal yang penting untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau lembaga. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pengukuran efisiensi dan efektivitas serta rumus untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah :

1. **Pengukuran Efisiensi:** Efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input). Untuk meningkatkan efisiensi, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:
  - Meningkatkan output pada tingkat input yang sama.
  - Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada peningkatan input.
  - Menurunkan input pada tingkat output yang sama.

- Menurunkan input (masukan) dalam proporsi yang lebih besar daripada penurunan output (keluaran).

2. **Pengukuran Efektivitas:** Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

**Tabel 2.3**

**Klasifikasi Pengukuran Rasio Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327*

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan akan digunakan sebagai pembanding serta dasar



pengembangan penelitian. Beberapa penelitian yang menjadi acuan peneliti adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
I Made Marayasa (2017)	Penilaian Kinerja Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i> Untuk Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran	Variabel: Kinerja Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i>	Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, terutama dalam hal penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, dapat dijelaskan sebagai berikut:  1. Rasio Ekonomi: Untuk penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, rasio ekonomi menunjukkan bahwa pada tahun 2012 dan 2013, rasionya sangat ekonomis. Sedangkan pada tahun 2010, rasionya cukup ekonomis, dan pada tahun 2009 serta 2011, rasionya juga tergolong ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan pajak hotel dan restoran, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng telah berhasil menggunakan anggaran secara efisien.

			<p>2. Rasio Efisiensi: Analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa dalam hal penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dari tahun 2009 hingga 2013, kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sangat efisien. Ini menandakan bahwa penerimaan pajak tersebut telah dicapai dengan penggunaan sumber daya atau input yang minimal.</p> <p>3. Rasio Efektivitas: Hasil analisis rasio efektivitas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dari tahun 2009 hingga 2013 juga sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng telah berhasil mencapai tujuan dalam mengumpulkan pajak dari sektor hotel dan restoran dengan hasil yang optimal.</p> <p>Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis ini, kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dalam mengelola penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dapat dikatakan berhasil, dengan pencapaian yang ekonomis, efisien, dan efektif selama periode yang diteliti.</p>
--	--	--	--

<p>Adi Erawan , dkk (2018)</p>	<p>Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng</p>	<p>Variabel: Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketimpangan tersebut dapat berupa perbedaan dalam alokasi anggaran untuk berbagai program dan kegiatan, dimana beberapa program mungkin mendapatkan alokasi yang berlebihan sementara yang lainnya mungkin kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Selain itu, adanya penyalahgunaan konsep value for money menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak selalu menghasilkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.</p> <p>Dampak dari ketimpangan dan penyalahgunaan konsep value for money ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan dalam penerapan konsep value for money menjadi penting agar pengelolaan anggaran publik dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat..</p>
------------------------------------	---	---	--

<p>Indrayani &amp; Khairunnisa (2018)</p>	<p>Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep <i>Value For Money</i> Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)</p>	<p>Variabel: Kinerja Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i></p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan konsep <i>Value For Money</i> yang meliputi tiga unsur utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, diperoleh temuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Ekonomi: Selama tahun 2014-2016, rasio ekonomi yang diperoleh adalah 86,54%, 82,64%, dan 71,43%. Hasil ini menunjukkan bahwa rasio ekonomi berada di bawah 100% selama periode tersebut, yang menandakan bahwa penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dianggap "ekonomis".</li> <li>2. Rasio Efisiensi: Selama periode penelitian, rasio efisiensi yang diperoleh adalah 94,69%, 105,17%, dan 97,95%. Meskipun pada tahun 2015 rasio efisiensi melebihi 100%, namun secara keseluruhan, kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe dinilai efisien dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan.</li> </ol>
---	--	--	---

			Dengan demikian, meskipun terdapat fluktuasi dalam rasio efisiensi, namun secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penerapan konsep Value For Money dapat dianggap efisien dan ekonomis dalam pengelolaan anggaran.
Nindy Cahya Feriska Sari (2014)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)	Variabel : Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Penerapan Konsep <i>Value For Money</i>	Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dengan menggunakan prinsip value for money. Analisis ini didasarkan pada tiga rasio utama, yaitu rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Rasio-rasio tersebut akan digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dwi Purwiyanti, (2017)	Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada	Variabel : Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam kegiatan fisik irigasi di Kodi Donggala pada

	<p>Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)</p>	<p>Penerapan Konsep <i>Value For Money</i></p>	<p>tahun 2014 memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara ekonomis, kinerja Dinas Pekerjaan Umum tergolong efisien dengan rasio ekonomi rata-rata di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja untuk kegiatan irigasi cenderung efisien, karena realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Dalam hal efisiensi, Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan kegiatan irigasi secara efisien dengan rata-rata efisiensi di bawah 100%. Artinya, pencapaian output atau hasil kerja dalam kegiatan irigasi telah dicapai dengan penggunaan sumber daya atau input yang minimal.</li> <li>3. Efektivitas pelaksanaan kegiatan irigasi juga terbukti baik, dengan efektivitas rata-rata mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan irigasi yang dilakukan telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau diharapkan.</li> </ol>
--	---	--	---

			Dengan demikian, secara keseluruhan, kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada kegiatan fisik irigasi di Kodi Donggala pada tahun 2014 dapat dikatakan berhasil dalam mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan kegiatan irigasi.100%.
--	--	--	---

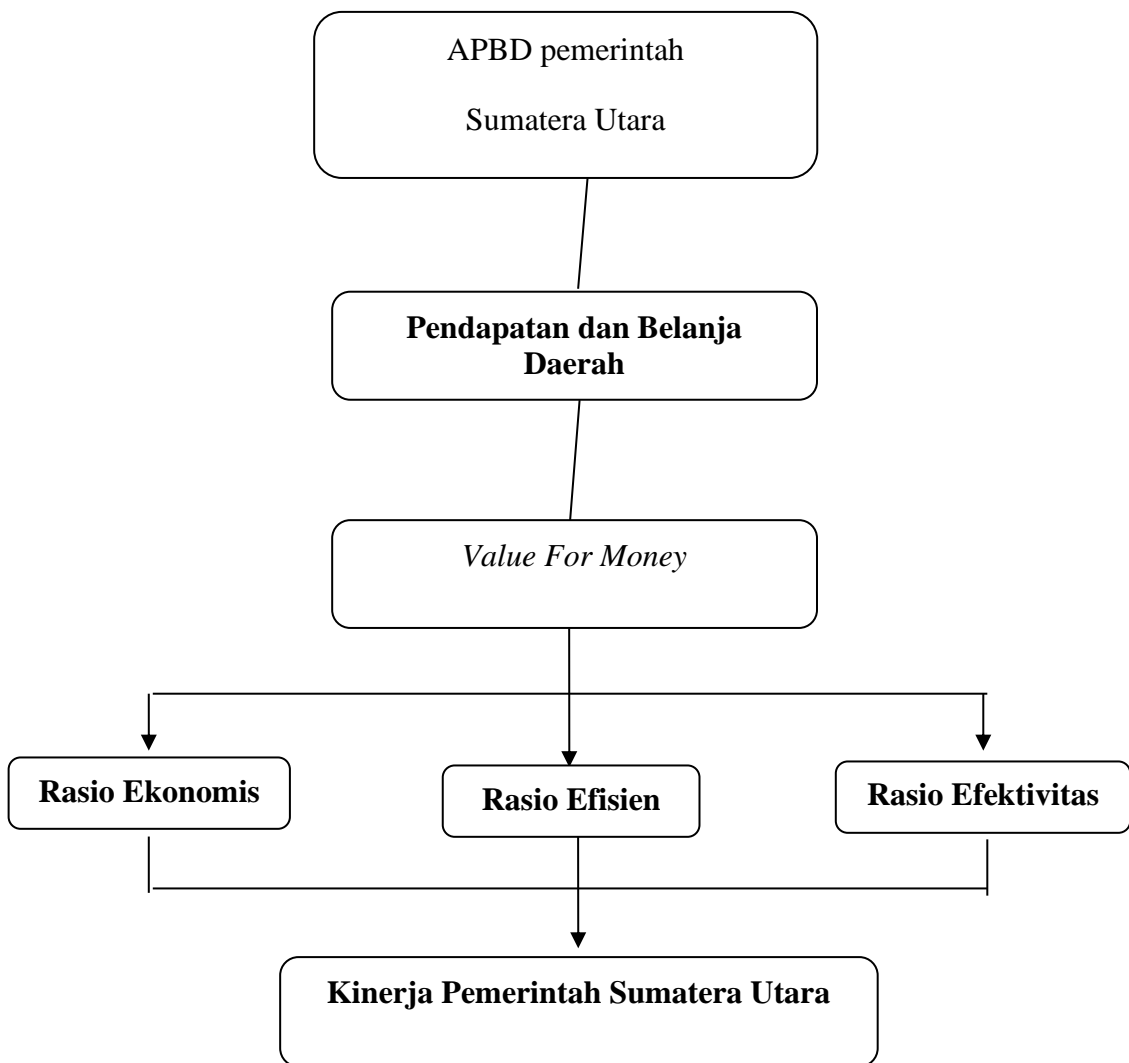
### 2.3 Kerangka Berpikir

Pengukuran kinerja pemerintah daerah sering dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Konsep ini menjadi inti pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintah karena mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah.

Pengukuran *Value for Money* mengacu pada prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran organisasi sektor publik, sementara efisiensi membandingkan input dan output dengan mencari hasil terbaik dari sumber daya yang digunakan. Efektivitas, di sisi lain, menilai seberapa jauh suatu target yang telah ditetapkan telah tercapai.

Dalam konteks retribusi daerah, efektivitas dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi dengan target penerimaan pajak dan retribusi. Jika persentase mencapai angka minimal 1 atau 100%, maka pajak dan retribusi daerah dianggap efektif.

Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pendekatan *Value for Money* dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Hal ini dapat dilihat dari:



*Gambar 2.1 Kerangka Berpikir*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh dari Pemerintah Sumatera Utara, khususnya data mengenai jumlah anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah. Pendekatan deskriptif memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena yang diteliti, yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki, seperti yang dijelaskan oleh Nazir (2016). Sementara itu, menurut Sugiyono (2017), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui analisis data anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menyajikan informasi secara sistematis tentang kondisi keuangan daerah tersebut, termasuk mengidentifikasi tren dan pola-pola yang muncul dari data anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah selama periode yang diteliti.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian digunakan dalam penelitian berada di Pemerintah Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.61, Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20159.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan Pada bulan Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rincian Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Agust				Sept				Des				Jan				Feb				Mar				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul				■																								
2	Pra Riset					■	■																						
3	Pembuatan Proposal							■	■	■																			
4	Seminar Proposal											■																	
5	Riset													■	■	■	■												
6	Penyusunan data																	■	■										
7	Analisis Data																			■	■	■							
8	Bimbingan Skripsi																									■	■		
9	Sidang Meja Hijau																											■	

### 3.3 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

#### 1. Variabel Penelitian

Variabel, menurut Manullang dan Pakpahan (2014:35), merupakan sifat-sifat yang dipelajari, simbol, atau lambang yang memiliki nilai numerik atau dapat dibedakan, serta memiliki variasi nilai atau perbedaan nilai.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep value for money untuk mengukur kinerja

#### 2. Definisi Operasional Variabel

Dalam Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengukuran kinerja dengan konsep value for money. Berikut adalah definisi dari variabel di atas:

*Value for Money*: Konsep ini mencakup penilaian terhadap rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas dalam pengukuran kinerja. *Value for Money* dapat diukur menggunakan rumus-rumus berikut:

a. Rasio Ekonomis: Mengukur tingkat kehematan Pengukuran ini memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Rumusnya adalah:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Efisiensi: Merupakan pengukuran nilai yang dihitung berdasarkan presentase belanja daerah dibagi dengan realisasi pendapatan daerah.

Rumusnya adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Efektivitas: Suatu kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan daerah sesuai dengan jumlah pendapatan daerah yang ditargetkan. Rumusnya adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan konsep ini, penelitian dapat mengevaluasi kinerja organisasi sektor publik dengan lebih komprehensif dan terukur. Penelitian dapat menggunakan ketiga rasio ini untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dari pengeluaran dan pendapatan pemerintah daerah.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berbentuk angka. Data ini diperoleh dari sumber data sekunder, yaitu data dokumentasi yang mencakup jumlah target pendapatan, pendapatan daerah, dan belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan data ini, penelitian akan melakukan analisis untuk menghitung rasio ekonomis dan mengevaluasi kinerja ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penggunaan anggaran belanja yang telah ditetapkan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari data laporan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Sumatera Utara selama Tahun 2018 sampai tahun 2022 merupakan metode yang tepat untuk penelitian ini. Dengan menggunakan data laporan anggaran dan realisasi yang disediakan oleh Pemerintah Sumatera Utara, peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya tentang kondisi keuangan daerah tersebut selama periode tersebut.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini terfokus pada perhitungan persentase dan data numerik lainnya untuk memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam tentang keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan pemikiran logis, penelitian ini

bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan data secara terperinci. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang diteliti dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

Melalui metode analisis deskriptif kuantitatif ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan dan menawarkan solusi untuk perbaikan jika diperlukan antara lain :

**Tabel 3.2**

**Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90-100%	Ekonomis
80-90%	Cukup Ekonomis
60-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

*Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327*

**Tabel 3.3**

**Klasifikasi Pengukuran Rasio Efisiensi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
( $\leq$ 60%)	Sangat Efisien
(60% - 80%)	Efisien
(80% - 90%)	Cukup Efisien
(90% - 100%)	Kurang Efisien
(> 100%)	Tidak Efisien

*Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327*

**Tabel 3.4**

**Klasifikasi Pengukuran Rasio Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327*

Menganalisis dan membahas kinerja *value for money* yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas Sumatera Utara.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara**

Dilihat dari sejarahnya, Sumatera Utara sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang saat itu masih bernama *Gouvernement Van Sumatra* dengan luas wilayah yang meliputi seluruh pulau Sumatera dan dipimpin oleh satu pemerintah daerah (Gubernur) yang berpusat di kota Medan. Namun pasca Kemerdekaan Indonesia, Provinsi Sumatera sendiri dibagi menjadi tiga provinsi berbeda yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, serta Sumatera Selatan yang kemudian memiliki hak untuk mengatur daerahnya masing-masing. Sementara itu Sumatera Utara sendiri merupakan gabungan dari tiga sub wilayah yakni Karesidenan Aceh, Karesidenan Sumatera Timur, dan Karesidenan Tapanuli. Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 10 – 40 Lintang Utara dan 98° – 100° Bujur Timur. Pada sebelah utara berbatasan dengan provinsi Aceh, pada sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, pada sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan pada sebelah Barat, Sumatera Utara berbatasan dengan Samudera Hindia.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai unit kerja yang disebut Dinas. Dinas ini bertanggung jawab atas berbagai aspek pelayanan dan tugas di tingkat provinsi. Sementara itu, unit staf yang mendukung kegiatan pemerintah provinsi disebut



Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sekretariat ini terdiri dari 11 (sebelas) biro, serta unsur pembantu pimpinan yang berada di luar Sekretariat.

Salah satu unsur staf di dalam Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Biro Keuangan. Biro ini bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan keuangan baik untuk kepentingan unit-unit staf di Sekretariat, seperti biro-biro lainnya, maupun untuk kepentingan unsur lini seperti Dinas-dinas dan perangkat vertikal Departemen Dalam Negeri lainnya, terutama dalam hal keuangan.

#### **4.1.2 Deskripsi Data Penelitian**

Penilaian Kinerja Pemerintahan Sumatera Utara berdasarkan konsep *value for money* sebagai berikut.

##### **1. Pengukuran Ekonomi**

Evaluasi kinerja ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah. Penilaian Untuk mengevaluasi kinerja ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, digunakan rasio ekonomis yang dihitung dengan rumus berikut ini :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{10.993.656.938.251}{12.290.330.450.127} \times 100\%$$

$$= 89,45\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{13.527.855.950.251}{14.726.662.153.406} \times 100\%$$

$$= 91,86\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{10.935.643.264.218}{11.494.671.486.409} \times 100\%$$

$$= 95,14\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{13.225.393.166.670}{13.953.318.293.830} \times 100\%$$

$$= 94,78\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{12.509.062.821.349}{13.395.006.196.440} \times 100\%$$

$$= 93,39\%$$

**Tabel 4.1**

**Rasio Ekonomis**

**Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	%
2018	12.290.330.450.127	10.993.656.938.251	89,45%
2019	14.726.662.153.406	13.527.855.950.251	91,86%
2020	11.494.671.486.409	10.935.643.264.218	95,14%
2021	13.953.318.293.830	13.225.393.166.670	94,78%
2022	13.395.006.196.440	12.509.062.821.349	93,39%

*Sumber : Data diolah (2024)*

Berdasarkan Berdasarkan Tabel 4.1, rasio ekonomis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun dapat dianalisis sebagai berikut:

- Pada tahun 2018, rasio ekonomis tidak disebutkan dalam data.
- Tahun 2019, rasio ekonomis sebesar 89,45%, masuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada antara 80% sampai 90%.
- Tahun 2020, rasio ekonomis meningkat menjadi 91,86%, masuk dalam kategori ekonomis karena berada antara 90% sampai 100%, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.
- Tahun 2021, rasio ekonomis turun menjadi 94,78%, tetap masuk dalam kategori ekonomis namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
- Tahun 2022, rasio ekonomis juga mengalami penurunan menjadi 93,39%, tetap masuk dalam kategori ekonomis namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Meskipun terjadi fluktuasi dalam rasio ekonomis, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mampu melakukan penghematan belanja setiap tahunnya. Ini terbukti dari fakta bahwa anggaran belanja yang telah ditetapkan tidak selalu habis terpakai saat realisasi. Meskipun demikian, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi syarat ekonomis dalam pengelolaan anggaran belanja.

Secara keseluruhan, rasio ekonomis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi. Analisis rasio ekonomis menjadi penting untuk mengevaluasi seberapa efisien penggunaan anggaran

belanja oleh pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

## **2. Rasio Efisiensi**

efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Rumus ini menghitung efisiensi berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Semakin kecil hasil perhitungan ini, semakin efisien penggunaan sumber daya keuangan oleh pemerintah provinsi dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan hasil bagi antara realisasi belanja dan anggaran belanja dengan 100% untuk menghasilkan nilai dalam bentuk persentase. Dalam mengukur tingkat efisiensi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{10.993.656.938.251}{12.703.058.587.890} \times 100\% \\ &= 86,54\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{13.527.855.950.251}{13.081.482.296.509} \times 100\% \\ &= 103,41\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{10.935.643.264.218}{12.916.359.750.490} \times 100\% \\ &= 84,67\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{13.225.393.166.670}{14.034.036.626.478} \times 100\% \\ &= 94,24\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022} &= \frac{12.509.062.821.349}{12.594.412.688.861} \times 100\% \\ &= 99,32\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.2**

**Rasio Efisiensi**

**Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah	%
2018	12.703.058.587.890	10.993.656.938.251	86,54%
2019	13.081.482.296.509	13.527.855.950.251	103,41%
2020	12.916.359.750.490	10.935.643.264.218	84,67%
2021	14.034.036.626.478	13.225.393.166.670	94,24%
2022	12.594.412.688.861	12.509.062.821.349	99,32%

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan data pada Tabel 4.2, terlihat bahwa rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Analisis tersebut mengungkapkan hal-hal berikut:

- Pada tahun 2018, rasio efisiensi adalah 86,54%, masuk dalam kategori cukup efisien karena berada di antara 80% hingga 90%.
- Namun, tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan menjadi 103,41%, masuk dalam kategori tidak efisien karena melampaui 100%. Ini menandakan penurunan efisiensi dari tahun sebelumnya.
- Tahun 2020, rasio efisiensi turun menjadi 84,67%, meskipun masih dalam kategori cukup efisien, menunjukkan peningkatan efisiensi dari tahun sebelumnya.
- Tahun 2021, rasio efisiensi naik menjadi 94,24%, namun masih masuk dalam kategori kurang efisien karena berada di antara 90% hingga 100%.
- Sementara pada tahun 2022, rasio efisiensi kembali meningkat menjadi 99,32%, tetapi masih termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada di antara 90% hingga 100%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan rasio efisiensi dari tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh peningkatan jumlah dan besarnya belanja daerah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai kurang efisien dalam pengelolaan anggaran

pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan. Meskipun berhasil menghasilkan pendapatan melebihi anggaran yang ditetapkan dan melakukan penghematan belanja, namun biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran belanja tersebut masih cukup besar. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut dalam pengelolaan anggaran agar efisiensi dapat ditingkatkan dan pengeluaran dapat lebih terkontrol.

### **3. Rasio Efektivitas**

Rumus ini menghitung efektivitas berdasarkan perbandingan antara realisasi pendapatan yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan target pendapatan yang telah ditetapkan. Semakin besar hasil perhitungan ini, semakin efektif Pemerintah Provinsi dalam mencapai tujuan pendapatan yang telah ditetapkan. Perhitungan dilakukan dengan mengalikan hasil bagi antara realisasi pendapatan dan target pendapatan dengan 100% untuk menghasilkan nilai dalam bentuk persentase. Dalam mengukur tingkat efektivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{12.703.058.587.890}{13.037.539.478.554} \times 100\%$$

$$= 97,43\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{13.081.482.296.509}{14.043.339.344.970} \times 100\%$$

$$= 93,21\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{12.916.359.750.490}{13.077.362.353.824} \times 100\%$$

$$= 98,77\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{14.034.036.626.478}{13.687.035.662.525} \times 100\%$$

$$= 102,54\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{12.594.412.688.861}{12.459.352.172.672} \times 100\%$$

$$= 101,08\%$$

**Tabel 4.3**

**Rasio Efektivitas**

**Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	%
2018	13.037.539.478.554	12.703.058.587.890	97,43%
2019	14.043.339.344.970	13.081.482.296.509	93,21%
2020	13.077.362.353.824	12.916.359.750.490	98,77%
2021	13.687.035.662.525	14.034.036.626.478	102,54%
2022	12.459.352.172.672	12.594.412.688.861	101,08%

*Sumber : Data diolah (2023)*



Berdasarkan Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diamati bahwa rasio efektivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pola sebagai berikut:

- Pada tahun 2018, rasio efektivitas sebesar 97,43%, masuk dalam kategori efektif karena berada di antara 90% hingga 100%.
- Tahun 2019, rasio efektivitas turun menjadi 93,21%, tetap masuk dalam kategori efektif karena berada di antara 90% hingga 100%.
- Pada tahun 2020, rasio efektivitas naik menjadi 98,77%, tetap masuk dalam kategori efektif karena berada di antara 90% hingga 100%.
- Tahun 2021 dan 2022, rasio efektivitas meningkat menjadi 102,54% dan 101,08% secara berturut-turut, sehingga masuk dalam kategori sangat efektif karena melebihi 100%.

Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil merealisasikan pendapatan yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Ini dapat diamati dari perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan pada tahun 2021 dan 2022.

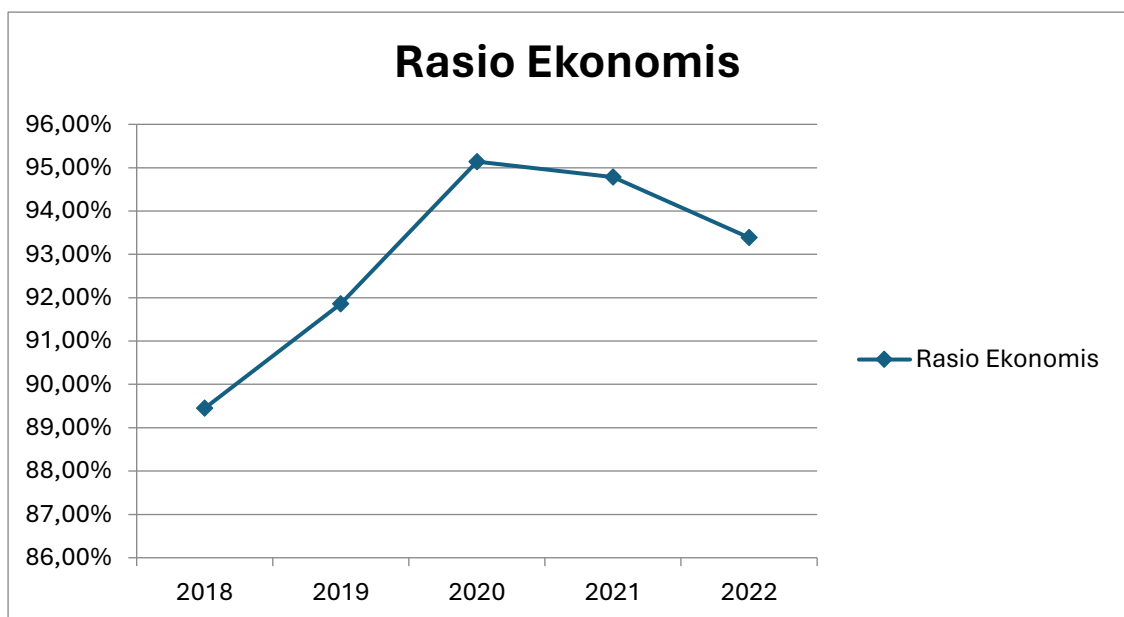
Tingkat rasio efektivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Terjadi penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019, namun kemudian meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam efektivitas penggunaan sumber daya keuangan oleh pemerintah provinsi tersebut.

## 4.2 Pembahasan

Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dikukur dengan prinsip *value for money* mengalami penurunan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Rasio Ekonomis

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka perubahan tingkat rasio ekonomis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:



**Gambar 4.1**

### **Rasio Ekonomis**

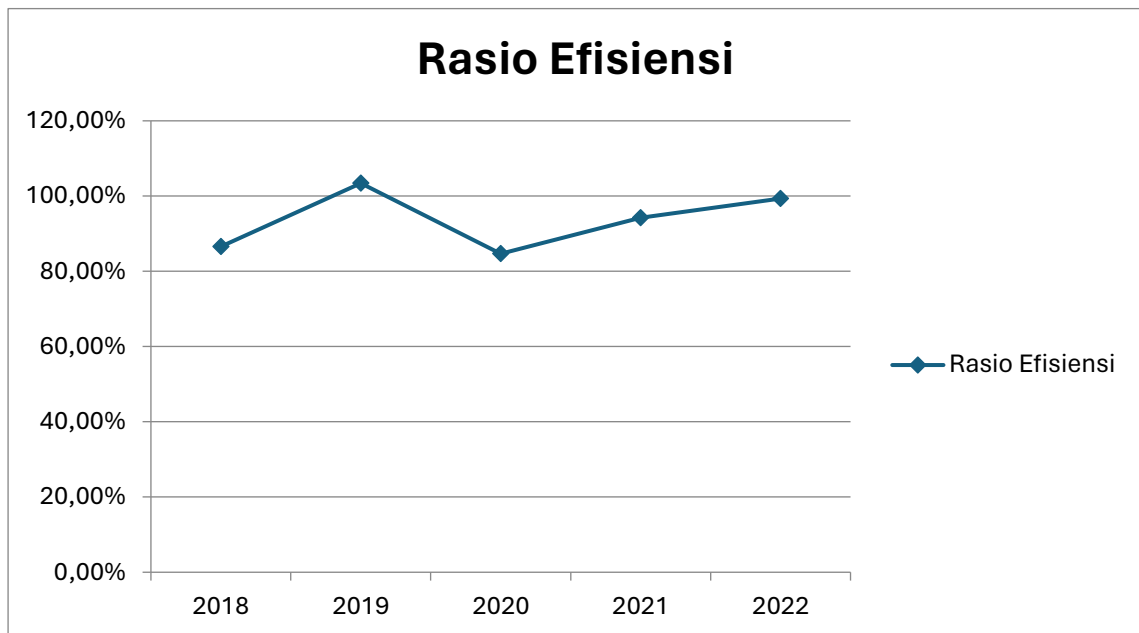
Dapat Dari analisis grafik tersebut, terlihat bahwa rasio ekonomis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi sebagai berikut:

- Pada tahun 2018, rasio ekonomis adalah 89,45%, masuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada di antara 80% hingga 90%.
- Tahun 2019, rasio ekonomis naik menjadi 91,86%, masuk dalam kategori ekonomis karena berada di antara 90% hingga 100%, menunjukkan peningkatan sebesar 2,41% dari tahun sebelumnya.
- Pada tahun 2020, rasio ekonomis naik menjadi 95,14%, tetap masuk dalam kategori ekonomis dengan kenaikan sebesar 3,28% dari tahun sebelumnya.
- Tahun 2021, rasio ekonomis turun menjadi 94,78%, masih masuk dalam kategori ekonomis meskipun mengalami penurunan sebesar 0,36% dari tahun sebelumnya.
- Di tahun 2022, rasio ekonomis turun menjadi 93,39%, tetap masuk dalam kategori ekonomis meskipun mengalami penurunan sebesar 1,39% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio ekonomis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Meskipun terjadi fluktuasi, rasio ekonomis masih berada dalam kategori ekonomis yang menunjukkan bahwa pemerintah telah relatif efisien dalam pengelolaan anggaran belanja dibandingkan dengan anggaran yang telah disediakan.

## 2. Rasio Efisiensi

Analisis data menunjukkan adanya perubahan tingkat rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 sampai 2022 yang dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4.2**

### **Rasio Efisiensi**

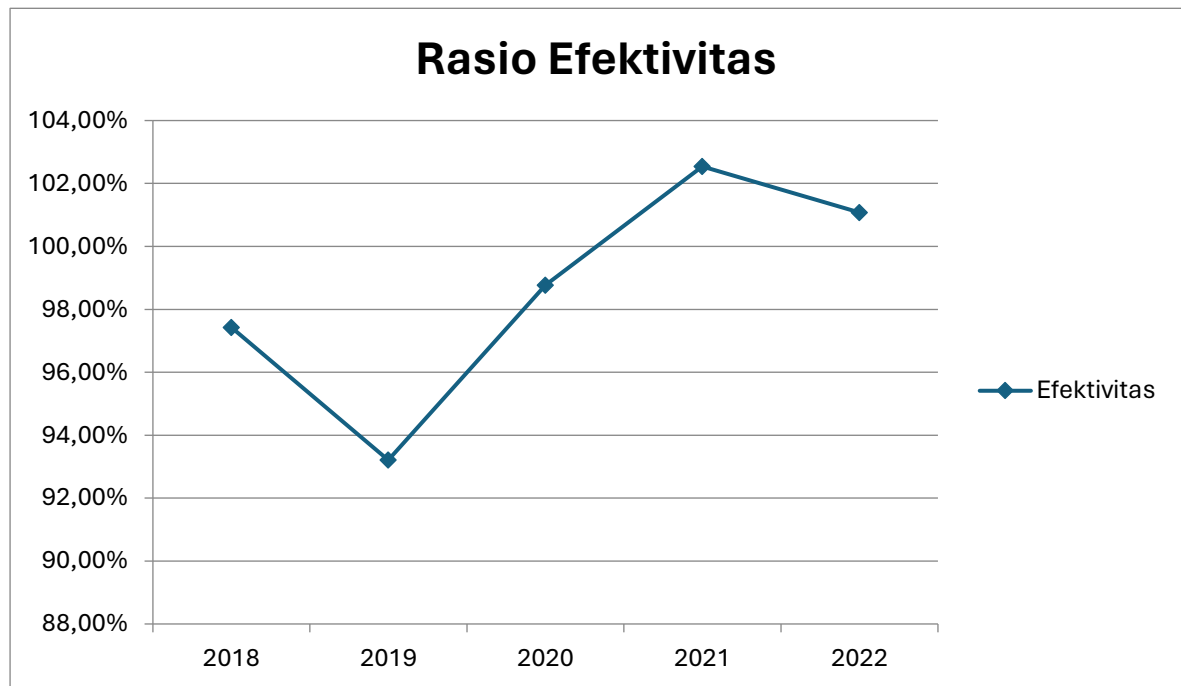
Dari analisis grafik di atas, terlihat bahwa rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pola sebagai berikut:

- Pada tahun 2018, rasio efisiensi adalah 86,54%, masuk dalam kategori cukup efisien karena berada di antara 80% hingga 90%.
- Tahun 2019, rasio efisiensi naik menjadi 103,41%, masuk dalam kategori tidak efisien karena melampaui 100%, menunjukkan peningkatan sebesar 16,87% dari tahun sebelumnya.

- Pada tahun 2020, rasio efisiensi turun menjadi 84,67%, masih masuk dalam kategori cukup efisien meskipun mengalami penurunan sebesar 18,74% dari tahun sebelumnya.
- Tahun 2021, rasio efisiensi naik menjadi 94,24%, masuk dalam kategori kurang efisien karena berada di antara 90% hingga 100%, menunjukkan peningkatan sebesar 9,57% dari tahun sebelumnya.
- Di tahun 2022, rasio efisiensi mencapai 99,32%, masuk dalam kategori kurang efisien karena berada di antara 90% hingga 100%, meskipun mengalami peningkatan sebesar 5,08% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam tingkat efisiensi.

### 3. Rasio Efektivitas

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya telah terjadi perubahan tingkat rasio efektivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4.3**  
**Rasio Efektivitas**

Dapat Dari analisis grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- Pada tahun 2018, rasio efektivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencapai 97,43%, masuk dalam kategori efektif karena berada di antara 90% hingga 100%.
- Tahun 2019, rasio efektivitas menurun menjadi 93,21%, masih masuk dalam kategori efektif namun mengalami penurunan sebesar 4,22% dari tahun sebelumnya.
- Pada tahun 2020, rasio efektivitas meningkat menjadi 98,77%, tetap masuk dalam kategori efektif dengan kenaikan sebesar 5,56% dari tahun sebelumnya.

- Tahun 2021, rasio efektivitas mencapai 102,54%, masuk dalam kategori sangat efektif karena melebihi 100%, menunjukkan peningkatan sebesar 3,77% dari tahun sebelumnya.
- Di tahun 2022, rasio efektivitas sedikit turun menjadi 101,08%, masih masuk dalam kategori sangat efektif meskipun mengalami penurunan sebesar 1,46%.

4. Penurunan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa disebabkan oleh penurunan pendapatan yang diterima sementara belanja tetap tinggi. Analisis menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2022, rasio ekonomis dan rasio efektivitas masih fluktuatif namun dalam rentang yang wajar. Namun, rasio efisiensi menunjukkan fluktuasi yang jauh dari kategori efisien. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan sumber pendapatan yang biasanya diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan prinsip value for money, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Rasio ekonomis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan situasi yang ekonomis karena realisasi belanja masih berada di bawah anggaran belanja. Namun, terdapat penurunan kinerja dari waktu ke waktu.
2. Rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan kurang efisiennya pengeluaran karena setiap tahunnya realisasi belanja relatif besar secara konsisten.
3. Rasio efektivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan efektivitas yang baik karena berhasil mencapai bahkan melebihi target pendapatan yang ditetapkan.

#### **1.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, disarankan untuk mengurangi belanja seefisien mungkin dan meningkatkan pendapatan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau defisit.
2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan memahami peranan *value for money* dalam mengukur



kinerja keuangan pemerintah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian di organisasi sektor publik lainnya, terutama di wilayah Sumatera Utara, guna mengetahui kinerja keuangan mereka. Dengan demikian, organisasi sektor publik di Sumatera Utara dapat menjadi lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Arfan Ikhsan, Muhamad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Ciptapustaka
- Bambang Prakosa, K. (2015). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Press. Bastian, I. (2016). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Fahmi, I. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Media. Halim, A. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.

- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Indonesia. (2009). Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Isna, A., & Ayu, A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 1(1).
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Nazir, M. (2016). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pakpahan, M., & Manullang, M. (2014). *Metode Penelitian*. Medan: Ciptapustaka Media.
- Petrie, M. (2010). A Framework For Public Sector Performance Contracting. *OECD Journal on Budgeting*, 1(1).
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.

- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Ramli, F. M. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor: Ghalis Indonesia.
- Rondonuwu, G. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2009-2014. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 4(2).
- Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suandy, E. (2016). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV
- Sujarweni. (2015). Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sutedi, A. (2014). Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Zimmerman. (2013). The Accounting Review. *The Accounting Review*, 2(2).